

DETERMINAN KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Henny Yulsiati¹, Evada Dewata², Bainil Yulina³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

*Korespondensi: henny.yulsiati@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan program *E-views* versi 12 dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan analisis regresi data panel, dan menerapkan metode pengambilan data sampel jenuh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022. Variabel independent dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka sedangkan variabel dependen adalah kesenjangan distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan data laporan hasil pemeriksaan pemerintah daerah kabupaten/kota Sumatera Selatan dan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesenjangan distribusi pendapatan, tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Sedangkan secara simultan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan di kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2018-2022.

Kata Kunci: kesenjangan distribusi pendapatan, desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka

Abstract

This study aims to determine the effect of fiscal decentralization, economic growth and the open unemployment rate on the income distribution gap in the Regency / City in South Sumatra Province in 2018-2022. This research uses the E-views version 12 program with a quantitative approach, uses panel data regression analysis, and applies a saturated sample data collection method for regencies / cities in South Sumatra Province in 2018-2022. The independent variables in this study are fiscal decentralization, economic growth and the open unemployment rate while the dependent variable is the income distribution gap. This study uses data from the South Sumatra district / city government audit report and data from the Central Statistics Agency. The results showed that fiscal decentralization and economic growth partially had no effect on the income distribution gap, the unemployment rate partially affected the income distribution gap. While simultaneously fiscal decentralization, economic growth and open unemployment rate have a significant effect on the income distribution gap in districts / cities in South Sumatra in 2018-2022.

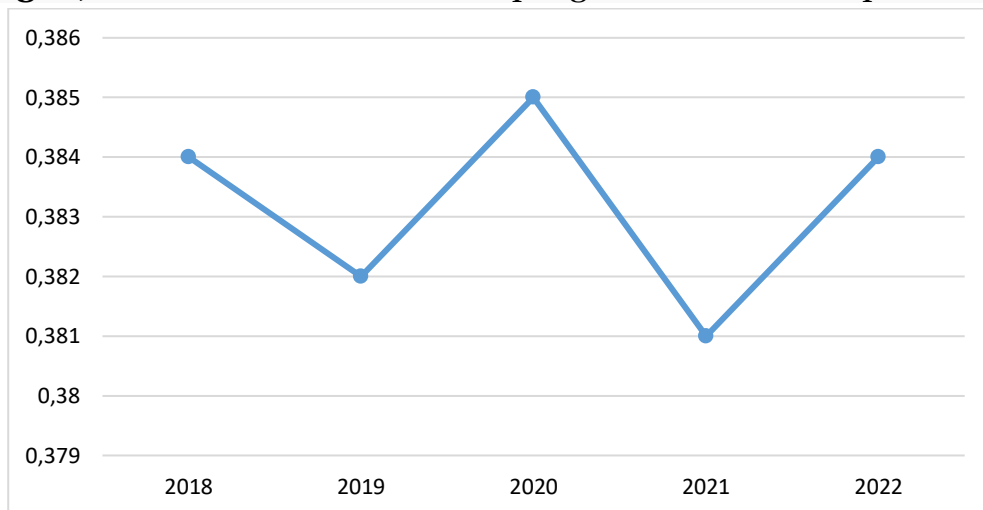
Keywords: income distribution gap, fiscal decentralization, economic growth, open unemployment rate

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan banyak provinsi dan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satu yang cukup rumit untuk dihadapi adalah masalah kesenjangan pendapatan di berbagai wilayah. Masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah tidak meratanya distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, yang berujung pada meningkatnya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Setiap negara berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan

menurunkan pengangguran. Dua permasalahan utama yang umumnya dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Tidak hanya negara berkembang yang menghadapi masalah kesenjangan pendapatan, negara maju juga tidak terkecuali. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besarnya kesenjangan yang ada dan sulitnya mengatasinya. (Aprilia,2022)

Kesenjangan pada dasarnya disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini kemampuan pada suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdeveloped Region*) (Dwiputra, 2018). Untuk mengukur kesenjangan pendapatan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil pengkajiannya akan tingkat kesenjangan ekonomi (*gini ratio*) penduduk Indonesia. Semakin rendah nilai **rasio gini**, semakin merata distribusi pengeluaran di antara penduduk.

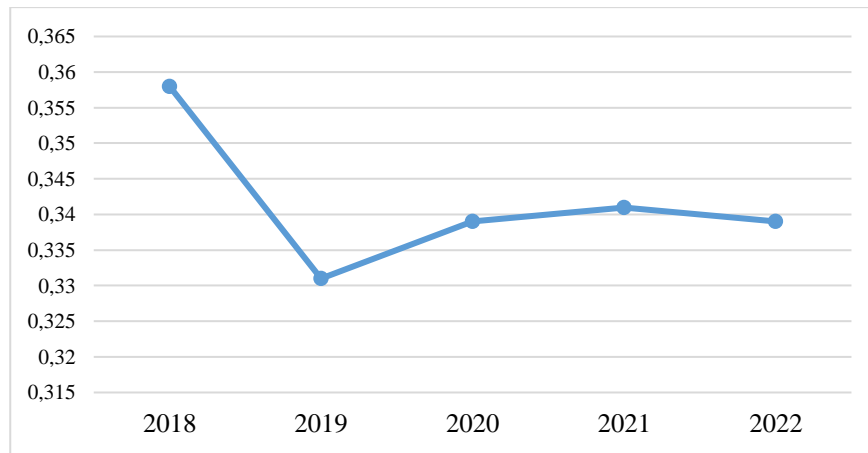


Gambar 1. Rasio Gini Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 1 dapat dilihat bahwa rasio gini di Indonesia tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 rasio gini Indonesia mengalami penurunan menjadi 0,382. Selanjutnya pada tahun 2020 rasio gini mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan pandemi covid-19 sehingga terjadi peningkatan rasio gini. Pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan dan tahun 2022 kembali meningkat. Namun kenyataannya, Keadaan kesenjangan pendapatan nasional ini berbanding terbalik dengan keadaan di Provinsi Sumatera Selatan.

Rasio gini pada Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 - 2022 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan keadaan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan objek berupa keadaan kesenjangan distribusi pendapatan pada Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan periode 2022 berada pada angka 0,339 berdasarkan rasio gini. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kesenjangan pendapatan nasional. Tingkat kesenjangan pendapatan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:



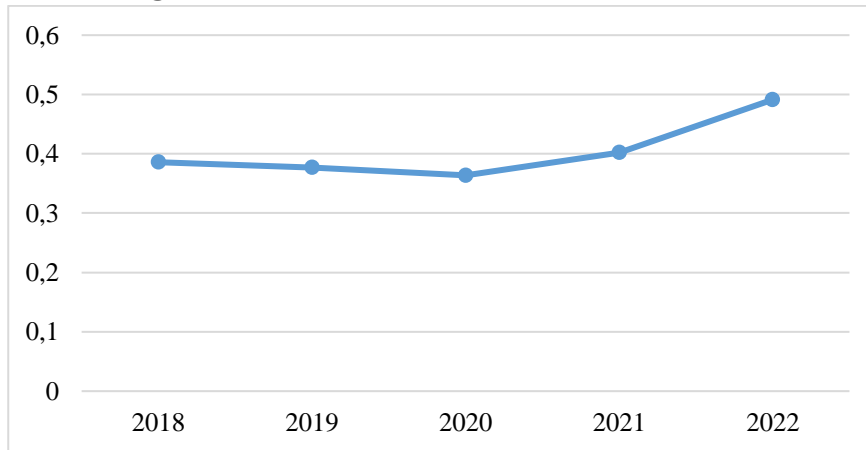
Gambar 2. Rasio Gini Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Data Diolah, 2024

Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat gini rasio yang bersifat fluktuatif dengan tren naik turun dalam indeks gini. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dan kemudian menurun hingga 2020. Namun, pada tahun 2021 indeks gini kembali menjadi 0,34 persen. Sedangkan pada tahun 2022 rasio gini Sumatera Selatan kemabli mengalami penurunan. Hal ini dapat mengarah pada kesimpulan bahwa ada kesenjangan sedang dalam distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan dan membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dikatakan sepenuhnya merata ke seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan atau dapat dikatakan timpang. Dalam hal kesenjangan, indeks gini merupakan suatu hal yang diperlukan untuk menilai tingkat kesenjangan pendapatan. Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, semakin mendekati angka nol bermakna bahwa tingkat pemerataan dari suatu variabel cukup baik. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semua pendapatan, semakin mendekati angka satu menandakan bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan (Riani, 2016).

Wilayah Sumatera Selatan adalah Provinsi yang terletak pada bagian selatan Pulau Sumatra. Secara topografi, wilayah Sumatra Selatan di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Secara umum wilayah kota mempunyai karakteristik utama dari lapangan usaha nonpertanian dan nonpertambangan. Sedangkan wilayah kabupaten bergantung pada perkembangan lapangan usaha pertanian dan pertambangan. Salah satu upaya pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yaitu dengan menerapkan konsep desentralisasi fiskal. Menurut Khusaini (dalam Cendani, 2022) menyatakan bahwa keuntungan sistem desentralisasi yaitu dengan adanya peningkatan pembangunan ekonomi suatu daerah, penyediaan barang publik sesuai kebutuhan daerah, peningkatan pelayanan administrasi daerah, dan peningkatan demokrasi. Dalam penelitian Sigit (2018) menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan. Salah satu indikator dalam desentralisasi fiskal adalah upaya peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD). Ketergantungan pemerintah daerah

terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga PAD diharapkan menjadi sumber keuangan daerah terbesar.



Gambar 3. Desentralisasi Fiskal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

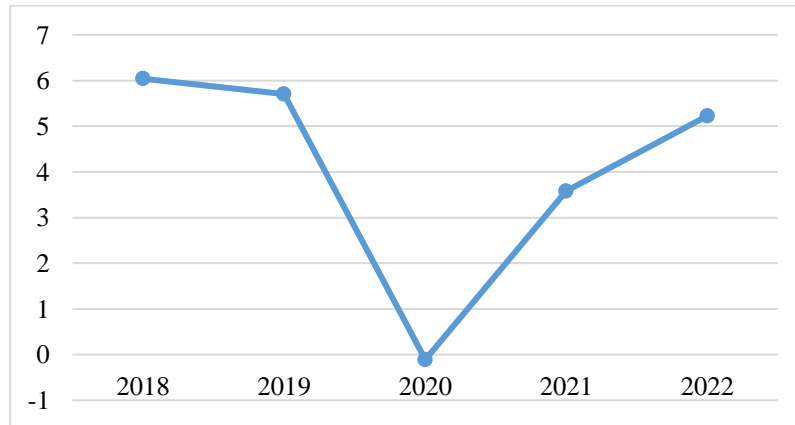
Sumber: Data Diolah, 2024

Faktor yang diduga meningkatkan Kesenjangan Pendapatan di Indonesia adalah Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Rambey (2018), peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan meningkatkan Kesenjangan Pendapatan dan sebaliknya. Suatu perekonomian yang dikatakan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi ketika tingkat aktivitas ekonomi lebih tinggi dari periode sebelumnya. Semakin tinggi pendapatan suatu masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya, dimana proses pembangunan ekonomi yang tidak merata memicu disparitas pendapatan di setiap daerah (Amri, 2017).

Dalam perekonomian, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada setiap daerah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan semakin baik. Percepatan pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun tertentu dapat diartikan sebagai peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada tahun tersebut. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pembangunan harus fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesenjangan wilayah dengan arah yang negatif. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga output juga meningkat. Bertambahnya output akan menambah pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya kesenjangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan di mana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan di suatu daerah menyebabkan perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (positif) karena terjadi proses peneteskan ke bawah (*trickling down effect*), sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (negatif) karena terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*).

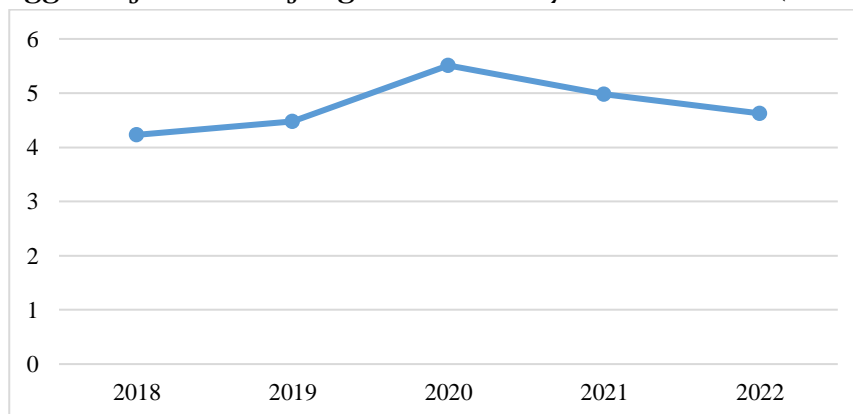
Selain pertumbuhan ekonomi, kesenjangan pendapatan (*income inequality*) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Kesenjangan pendapatan berkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi kesenjangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin) (Amri, 2017).



Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Data Diolah, 2024

Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka diukur dengan jumlah orang yang menganggur di suatu daerah sebagai persentase dari total angkatan kerja. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran di daerah tersebut, begitu juga sebaliknya. Pertumbuhan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, mengakibatkan terjadinya pengangguran yang masif. Pertumbuhan ekonomi di daerah berkembang cenderung lambat jika diskusi atau kebijakan pemerintah tidak membahas masalah ketenagakerjaan. Akan terjadi pengangguran terbuka di daerah karena lambat dan tidak meratanya pembangunan antar daerah. Semakin banyak orang yang bekerja dapat mengurangi kesenjangan pendapatan, dan jika jumlah pengangguran meningkat maka jumlah penduduk tanpa pendapatan akan meningkat, sehingga terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin (Hariani, 2019).



Gambar 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

Sumber: Data Diolah, 2024

Gambar 5 menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat pengangguran terbuka yang fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran di Sumatera Selatan masih belum stabil, pengangguran yang tinggi akan menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraannya, sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada kesenjangan pendapatan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Sigit (2018) yang menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan kesenjangan pendapatan antarprovinsi di Indonesia. Namun, perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel independen. Untuk objek penelitian menggunakan tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan. Hasil penelitian Sigit (2018) menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 10% kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dalam mengurangi kesenjangan antarprovinsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Rambey (2018), menyatakan bahwa Kesenjangan Pendapatan di Indonesia secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Silaban dkk., (2024), menyatakan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kesenjangan Pendapatan dengan nilai probability 0,2952. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kesenjangan Pendapatan dengan nilai probabilitynya sebesar 0,7193.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal (X1) Pertumbuhan Ekonomi (X2) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kesenjangan pendapatan (Y).

Populasi secara umum adalah jumlah keseluruhan yang terdiri dari: objek atau subjek yang memiliki kualitas dan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Menurut (Sugiyono, 2017) yaitu teknik menentukan sampel apabila seluruh anggota populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian atau dapat disebut juga dengan sensus dalam lingkup kecil. Dalam penelitian ini seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan dijadikan sampel. Dapat disimpulkan bahwa sampel yang diambil adalah data LKPD dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2018 - 2022, dengan jumlah sampel sebanyak 85 sampel.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yang mana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan

pemilihan model data panel, uji asumsi klasik dengan menggunakan alat bantu program Econometric Views (*EViews*) versi 12. Adapun keunggulan yang dimiliki oleh *Eviews*12 yaitu dapat membedakan efek individu dan efek waktu serta metode ini tidak perlu menggunakan asumsi bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas (Ghozali et al, 2013:261).

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kesenjangan Pendapatan

β_0 = Konstan

β_1 - β_3 = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

X1 = Desentralisasi Fiskal

X2 = Pertumbuhan Ekonomi

X3 = Tingkat Pengangguran Terbuka

E = Kesalahan pengganggu (error term)

Dalam pemilihan data panel yang tepat, ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Deteksi penyimpangan asumsi klasik menggunakan deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, deteksi autokorelasi dan uji normalitas, serta uji secara parsial dan simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier yang dilakukan model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM). Sehingga persamaan regresi data panel yaitu sebagai berikut:

$$Y = 0,3374 - 0,2194*X_1 - 0,0027*X_2 + 0,0043*X_3$$

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,3374 artinya tanpa adanya variabel desentralisasi fiskal (X1), tingkat pengangguran terbuka (X2) dan pertumbuhan ekonomi (X3). Maka variabel kesenjangan distribusi pendapatan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,26.
2. Koefisien regresi variabel desentralisasi fiskal (X1) sebesar -0,2194. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan desentralisasi fiskal sebesar 1 satuan, maka akan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan sebesar -0,2194 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
3. Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (X2) sebesar -,0027. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan, maka akan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan sebesar -0,0027 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
4. Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka (X3) sebesar 0,0043. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 satuan, maka akan menambah kesenjangan distribusi pendapatan sebesar 0,0043 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Berdasarkan persamaan regresi data panel, kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdampak kesenjangan pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Nilai Kesenjangan Pendapatan
1	Kabupaten Banyuasin	0,012211
2	Kabupaten Empat Lawang	0,004367
3	Kabupaten Lahat	-0,008370
4	Kabupaten Muara Enim	0,033032
5	Kabupaten Musi Banyuasin	0,031044
6	Kabupaten Musi Rawas	-0,049023
7	Kabupaten Musi Rawas Utara	-0,067219
8	Kabupaten Ogan Ilir	-0,022682
9	Kabupaten Ogan Komering Ilir	-0,015185
10	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1,180005
11	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	-0,039422
12	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	-0,027691
13	Kabupaten Pali	-0,019009
14	Kabupaten Lubuk Linggau	0,007286
15	Kota Pagar Alam	-0,010007
16	Kota Palembang	0,133855
17	Kota Prabumulih	0,036746

Sumber : Data Diolah, 2024

Maka dapat disimpulkan berdasarkan tabel diatas bahwa Kabupaten Empat Lawang memperoleh tingkat kesenjangan distribusi pendapatan terkecil dengan nilai 0,004367 dan Kabupaten Ogan Komering Ulu memperoleh tingkat kesenjangan distribusi pendapatan terbesar dengan nilai 1,180005 di Provinsi Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0,219410	0,162015	-1,354257	0,1803
X2	-0,002693	0,002243	-1,200677	0,2342
X3	0,004272	0,001852	2,306652	0,0243

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil uji t pada variabel desentralisasi fiskal (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar $1,354257 < 1,98896$ dan nilai signifikan $0,1803 > 0,05$. Maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Aditya, 2020) dan (Theresia & Agus, 2015) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kesenjangan distribusi pendapatan.

Hasil uji t pada variabel pertumbuhan ekonomi (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar $1,200677 < 1,938969$ dan nilai signifikan $0,2342 > 0,05$. Maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (RF Yoertiara & Nur, 2022) yang

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesenjangan distribusi pendapatan.

Hasil uji t pada variabel tingkat pengangguran terbuka (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar $2,306652 < 1,98895978$ dan nilai signifikan $0,0243 > 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan peneliti terdahulu (RF Yoertiara & Nur, 2022) menyatakan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kesenjangan distribusi pendapatan.

Tabel 3. Hasil Uji F

R-squared	0,837327
Adjusted R-squared	0,789777
S.E. of regression	0,020088
F-Statistic	17,60921
Prob(F-Statistic)	0,000000

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil uji f pada variabel independen sebesar $17,60921 < 2,48444144$ dan nilai signifikan $0,000000 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan.

Tabel 4. Uji Determinasi (R²)

R-squared	0,837327
Adjusted R-squared	0,789777
S.E. of regression	0,020088
F-Statistic	17,60921
Prob(F-Statistic)	0,000000

Sumber: Data Diolah, 2024

Nilai adjusted R Square sebesar 0,789777 atau 78,9777%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka mampu menjelaskan variabel Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan sebesar 78,9777%, sedangkan sisanya yaitu 21,0223% ($100 -$ nilai adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa secara parsial desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesenjangan distribusi pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Secara simultan desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesenjangan distribusi pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Aditya, 2020) dan (Theresia & Agus, 2015) yang menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap

kesenjangan distribusi pendapatan dan juga penelitian yang dilakukan (RF Yoertiara & Nur, 2022) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesenjangan distribusi pendapatan, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kesenjangan distribusi pendapatan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan sampel tahun 2018 sampai dengan 2022 dan terbatas hanya di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk menambah variabel independen lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa memperluas populasi dan menambah sampel penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

- Aditya. 2022. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan.
- Cendani, R. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesenjangan Distribusi Pendapatan. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 617-629.
- Dwiputra. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia (Periode 2011-2016). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
- Putri. S. M. J. Silaban. Annerika. S., Jessica. P. 2024. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Di Sumatera Utara. Vol.13.1.
- Raditya. T. D. O. Wantara. A. 2015. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan Wilayah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1991-2012. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*.
- Rambey. M. J. 2018. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesenjangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*. Vol.4. 1.
- Sigit. D. S. 2018. Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan Antarprovinsi di Indonesia. *Symposium Nasional Keuangan Negara*, 978-1001.
- Yoertiara. R. F. Feriyanto. N. 2022. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi dipulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*.